

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” sesuai dengan apa yang termuat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, dimana hukum itu sendiri harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan sebagai dorongan menciptakan keamanan dan ketertiban sehingga memberikan keberhasilan dalam memberi rasa aman kepada masyarakat dan negara, hukum dibuat agar adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang di berikan kepada masyarakat dan setiap individu yang berada di wilayah hukum tersebut ,maka untuk mencapai hal tersebut aturan ,ataupun hukum haruslah diciptakan untuk menjadikan suatu Negara lebih baik dari segi sosial masyarakat ,pemerintahanya dan dalam bidang ,keilmuan dan lainnya sehingga menciptakan ke amanan terhadap hak dan kewajiban masing-masing..

Maka di dalam bidang ke ilmunan yang menyangkut informasi maupun suatu bidang ilmu tertentu di buatlah aturan yang di peruntukan tidak adanya pemanfaat terhadap hal yang negative akan kegiatan tersebut atau kebebasan dalam mengekspresikan maupun menuangkan ilmu dan pengetahuan seseorang di dalam suatu literature berupa barang cetakan , seperti yang tercantum dalam pengertian barang cetakan itu sendiri di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil penggandaan tulisan dan atau gambar di atas kertas atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada percetakan ,melalui proses mekanik atau

fotografis ,meliputi penggunaan block,stensil,atau negartif dan dikirim terbuka baik dalam sampul maupun tidak.¹ . menurut Eric Barnow mengemukakan bahwa barang cetak memiliki pengertian sebagai segala barang yang dicetak dan ditujukan untuk umum.

Adapun dalam pengawasan barang cetakan tugas dari kejaksaan yaitu Untuk mengawasi peredaran barang cetakan pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*, asas perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum dan Pasal 28E ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setiap orang bebas untuk berkumpul dan berserikat untuk mengeluarkan pendapat . Pemaknaan ketiga prinsip tersebut harus dihubungkan dengan dasar falsafah hak asasi manusia di Indonesia, cita hukum, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang terkandung dalam lima sila Pancasila, yang menekankan pada keseimbangan dan keserasian antara hak dan kewajiban.

Dalam konteks Pasal 30 ayat 3 huruf c Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, persoalan yang muncul bukan terletak pada keberadaan norma hukum dalam Pasal tersebut, tapi lebih pada prosedur atau tatacara agar norma hukum tersebut dijalankan, dalam hal ini pelarangan suatu barang cetakan, yang tidak transparan dan akuntabel, serta tidak sesuai tiga prinsip dimaksud ².

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 menyebutkan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya , dan setiap orang juga berhak untuk serta mencari ,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia Di dalam Pasal 4 Butir A dan B Undang-Undang No 3

¹ kewenangan barang cetakan, <http://m.hukumonline.com>, update tgl 05 Mei 2019 20:05

² Mahrus ahli , *Pengawasan barang cetakan Dur proseses of law dan hak kebebasan mengeluarkan pendapat*, jurnal konstitusi vol.8, No.4, Agustus 2011, hal 4

Tahun 2017 Tentang penyelenggaraan system perbukuan yang bertujuan untuk Menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan system pembukuan ,mengatur dan mewujudkan system perbukuan serta meningkatkan mutu jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan buku bermutu murah dan merata, Namun dalam beberapa hal atau kasus yang pernah terjadi masih banyak ketidak sepakatan yang terjadi kepada tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penyitaan ataupun penarikan barang cetakan yang dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu ketertibaban .

Sebagai salah satu contoh kasus yang menjadi masalah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang cetakan dapat dilihat dalam kasus keberatan Darmawan, penulis buku “Enam Jalan Menuju Tuhan” dilarang peredarannya oleh Kejaksaan, dengan dasar hukum Pasal 30 ayat 3 huruf c Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa “Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan terhadap barang cetakan”, tapi lebih berhubungan dengan prosedur agar norma tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan Teori Efektifitas hukum dan prinsip *due process of law*, Seperti yang sudah dijelaskan di atas teori efektifitas hukum salah satu cara sebagai tolak ukur norma itu efektif atau tidak sedangkan untuk *due process of law* menurut Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa istilah *due process of law* secara sederhana diterjemahkan dengan istilah proses hukum yang adil. Lawan *due process of law* adalah *arbitrary process* atau proses yang sewenang-wenang, misalnya hanya didasarkan pada kekuasaan aparat penegak hukum. *Due process of law* seringkali disalah artikan maknanya, hal ini karena makna dan hakikat proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau perundang-undangan yang diasumsikan adil

secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga Negara.³

Melihat kasus tersebut maka perlu diketahui lagi tentang keefektifitasan pelaksanaan pengawasan terhadap barang cetakan yang di atur dalam pasal 30 ayat 3 huruf c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dapat kita melihat efektifitas pelaksanaan tersebut dari beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk efektifitas hukum itu melalui Teori efektifitas hukum, dimana Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Dilihat adanya kesenjangan dalam pelaksanaannya yang menjadikan hukum itu menjadi tidak efektifitas dapat dilihat dari salah satu isi keberatan Darmawan dalam permohonan Pasal 30 ayat 3 huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagai berikut; yang di mana dalam di jatuhkannya vonis tersebut justru diketahui dari media massa. Tidak pernah ada kontak sekalipun dari pihak kejaksaan baik berupa pemberitahuan awal dimulainya penelitian/pengkajian atau komunikasi dalam bentuk apapun yang menyatakan bahwa buku yang ditulis pemohon tengah diteliti oleh Kejaksaan maupun dinyatakan bahwa buku yang ditulis pemohon akan dilarang peredaran dan penggandaannya. Pemohon tidak pernah dipanggil atau diajukan

³ Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994, hal 27, 49.

pertanyaan secara tertulis untuk menjelaskan lebih lanjut tentang buku hasil tulisan pemohon tersebut.”⁴

Tulisan ini secara khusus mengkaji hubungan antara pengawasan peredaran barang cetakan yang dimiliki Kejaksaan dengan Teori Efektifitas hukum nya sebagai tolak ukur apakah Pasal tersebut sudah efektif dengan melihat keterkaitanya dengan prinsip *due process of law* apakah kewenangan Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat 3 huruf c Sudah efektif atau tidak, dalam Pasal 28D ayat 1 serta hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. dapat kita simpulkan bahwa karna adanya aturan yang memberikan wewenang kepada kejaksaan ini memberikan tanggung jawab dan kewenangan terhadap tindakan kejaksaan dalam melakukan tugasnya dalam ikut menyelenggarakan pengawasan terhadap barang cetakan , karna adanya ketidak efektifaan terhadap aturannya tersebut maka penulis mengambil judul “**Analisis Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Pasal 30 Ayat 3 Butir C Undang-Undang No 16. Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pengawasan Terhadap Barang cetakan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektifitas pelaksanaan Pasal 30 Ayat 3 Butir C Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap barang cetakan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri ?
2. Apakah yang menjadi hambatan kejaksaan dalam Pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan terhadap barang cetakan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

⁴ Darmawan, *Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.hal 14

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan efektifitas Pasal 30 Ayat 3 Butir C Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan dalam penyelenggaraan Pengawasan Barang Cetakan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
2. Hambatan dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap barang cetakan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan wewenang kejaksaan dalam menjalankan wewenangnya .
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitan yang peneliti tulis.
2. Manfaat Praktisi
 - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindakan yang di lakukan kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharap kan menambah keilmuan dan pengetahuan bagi penulkis sehingga meningkat kan teknik penulisan, dan dapat menerapkan serta mensosialisasikan keilmuanya ,sehingga mendapatkan manfaat bagi penulis untuk kedepanya setelah menyelesaikan tulisan penelitian hukum ini .

2. Bagi Masyarakat

Dari penulisan ini masyarakat di harapkan mengetahui dan memahami tentang masalah hukum khususnya yang penulis tulis dalam penelitian ini sehingga memberikan manfaat dalam bidang keilmuan secara teori maupun prakteknya dalam sehari-hari di masyarakat.

3. Bagi Penegak hukum

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat menjadi masukan kepada para penegak hukum khususnya jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti amanat dalam Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara atau langkah-langkah tertentu dalam menemukan kebenaran ,tergantung dari realitas yang sedang di kaji, metodologi tersusun dari cara yang struktur untuk memperoleh ilmu metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan

Metode Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).⁵yuridis nya adalah tentang pasal 30 ayat 3 Butir C UU No

⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan sedangkan tentang sosiologisnya adalah penerapan pelaksanaan oleh kejaksaan dalam Pengawasan peredaran terhadap barang cetakan.

2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Kediri beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.8, Mojoreto, Kec. Mojoroto ,Kediri,Jawa Timur, 64112 sebagai lokasi penelitian ,alasan memilih Kejaksaan Negeri Kota Kediri adalah karna terdapat masalah yang sedang peneliti lakukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

3. Jenis Data

Data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, wawancara terhadap beberapa masyarakat, serta wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pengawasan terhadap barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini,dalam data sekunder ini ialah data yang dapat memberikan uraian atas data primer baik dalam bentuk penjelasan dan keterangan lebih lanjut atas data primer :

1. Berbagai jenis bahan bacaan seperti Jurnal, buku, pendapat para ahli ataupun sarajana sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.
2. Bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945 dan UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, UU No 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan System Perbukuan dan Bahan hukum lainnya
3. Serta bacaan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan pengawasan terhadap barang cetakan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran penelusuran di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode yang dilakukan dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada narasumber yang di anggap memahami dan mengetahui terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
3. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
4. Dan dengan jaksa yang pernah menangani kasus yang berkaitan dengan kasus penyelenggaraan pengawasan terhadap barang cetakan.

b. Observasi

Dalam hal ini penulis bersentuhan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dan dilakukan dalam metode melihat secara langsung prosese penyelenggaraan pengawasan terhadap barang cetakan secara langsung di

lapangan guna untuk mendapatkan data-data yang di inginkan sesuai dengan penelitian ini yaitu penyelenggaraan pengawasan terhadap barang cetakan Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

c. Studi Dokument

Penelitian Dokument dimaksudkan memperoleh data melalui penelusuran data untuk objek penelitian yaitu pengawasan terhadap barang cetakan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan mengutip, merangkum, dan membuat catatan-catatan serta menganalisis peraturan perundang-undangan.

5. Teknik Analisa Data

Seluruh data yang terkumpul ,baik yang berasal dari study lapangan maupun keperpustakaan dianggap cukup ,maka penulis akan mengelolah data dengan metode analisi menggunakan Analisa deskriptif kualitatif yang akan disajikan dengan menguraikan dan menjelaskan berdasarkan apa saja yang telah didapat dalam penelitian ini .

6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan hukum ini penulis akan membuat 4 BAB yang di jabarkan dalam daftar isi dalam penulisan ini ,masing masing bab memiliki pembahasan dan teori serta analisa melalui bidang keilmuan khususnya dalam bidang hukum ,dengan penjelasan Sebagai berikut;

1. BAB 1 Pendahuluan

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan

2. BAB 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan konsep teoritis penelitian mulai dari tentang bahan-bahan, teori, pendapat para ahli dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. BAB 3 Hasil penelitian / Pembahasan

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait dengan pasal 30 ayat 3 butir C UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

4. BAB 4 Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang perlu disampaikan guna kebutuhan keilmuan dan sebagai penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang diteliti.

